

**RANCANGAN AKHIR
RENJA
TAHUN 2023**



**KECAMATAN KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KECAMATAN KUTA ALAM

Jl. Syiah Kuala No.4 Telp. (0651) 32407 Kode Pos 23126
BANDA ACEH

KEPUTUSAN CAMAT KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH NOMOR 11.3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

CAMAT KUTA ALAM

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan sebuah Keputusan mengenai penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2023.
- MENGINGAT** :
- 1 Undang-Undang Nomor (Drt) 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran. Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45855);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PEW/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 8 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 11 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- 12 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027;


17 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017- 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2023
- KEDUA** : Pemberlakuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 sebagai
Acuan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kecamatan Kuta
Alam Kota Banda Aceh;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Januari 2023

CAMAT KUTA ALAM

ARIE JANUAR, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 198101272000121003



DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	4
Daftar isi	2
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	13
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaam Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	15
2.1.1. Evaluasi program/kegiatan yang tidak memnuhi target kinerja hasil/kelurahan yang direncanakan	17
2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	19
2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	19
2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhnya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.....	20
2.1.5 Implementasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra program	

Renstra Perangkat Daerah	21
2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.....	21
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	38
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	43
2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kecamatan Kuta Alam	43
2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	53
2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.....	53
2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Kuta alam Kota Banda Aceh.....	54
2.3.5 Formulasi isu-isu penting	56
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	44
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	47
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	47



3.3. Program dan Kegiatan	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH	55
BAB V PENUTUP	56
a. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	
b. Rencana tindak lanjut.....	
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. karena atas dengan izin dan karunia-Nya maka pada kesempatan ini kami telah dapat menyusun Rancangan Akhir RENJA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Selanjutnya salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Rancangan Akhir RENJA ini merupakan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan SKPK yang disusun sesuai dengan rencana kinerja dan tupoksi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada kami. Diharapkan nantinya Rancangan Akhir RENJA 2023 dapat menjadi dasar pelaksanaan Kegiatan selama tahun 2023 guna meningkatkan kinerja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Kami sangat sadar bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir RENJA ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan kami, oleh karena itu dengan rendah hati kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penyusunannya akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RENJA ini dan semoga dapat bermanfaat. Aamiin.

Banda Aceh, Juli 2022



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban Pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip *Akuntabilitas, Transparansi, Rule of Law Profesionalisme, Efektivitas* dan *Efesiensi*.

Perencanaan yang matang dan berkesinambungan merupakan suatu konsep yang harus dipegang oleh setiap SKPD dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga sasaran yang dicita-citakan dapat terwujud guna menjawab dinamika dan tantangan daerah setiap tahunnya.

Dengan modal tersebut diharapkan Pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja

(renja) perangkat daerah memuat Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan Penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkait dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Proiritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Kuta Alam menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengkoordinir hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan, Forum satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugas.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota Kepada Camat yang mengamanatkan 6 (enam) bidang pelimpahan, yaitu :

1. Bidang Penertiban;
2. Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong;
3. Bidang Pendidikan;
4. Bidang Kesehatan;
5. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
6. Bidang Pendapatan Asli Daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan gampong.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam

pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat gampong, Kecamatan dan Kota.

Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan menjadi kewajiban Camat.

Kantor Camat Kuta Alam adalah salah satu SKPD yang mengemban tugas pemerintahan Kecamatan. Oleh karena itu, perlu suatu rancangan rencana kerja dalam setiap pelaksanaannya.

Rancangan Akhir Renja tersebut disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kantor Camat Kuta Alam serta berpedoman pada RPJM Kota Banda Aceh. Dimana pelaksanaan perencanaan tersebut disusun untuk jangka waktu pemerintahan 1 tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, yang tentunya mendukung visi dan misi Walikota Banda Aceh sebagai dijabarkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026.

Prinsip-Prinsip di dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD 2023;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas Pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat daerah;
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang

simulatan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

4. Rumusan program/kegiatan didalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penenganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Kuta Alam tahun 2023 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kuta Alam tahun 2023, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2023, dan akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kuta Alam untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan awal Renja Kecamatan Kuta Alam 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286)
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- ;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 - 2029;
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebahagian Kewenangan Walikota kepada Camat.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebahagian Kewenangan Walikota kepada Camat.

14. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat (7), undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Qanun Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banda Aceh 2017-2022;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
20. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri No 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan tahun 2023 yang mengacu pada Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Kuta Alam 2023 - 2026.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah :

- Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Kuta Alam tahun 2023
- Merumuskan kebijakan pembangunan kota Banda Aceh tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kuta Alam

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Dokumen Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2023 ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan awal Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan evaluasi Renja Tahun 2021 dan Capaiannya Renstra Tahun 2017-2022, analisi kinerja pelayanan perangkat daerah, serta isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah termasuk strategi dan arah kebijakan perangkat daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran termasuk total kebutuhan dana/pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut..

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

KECAMATAN KUTA ALAM TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kuta Alam Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh telah menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat tingkat desa atau gampong. Perencanaan yang dilaksanakan sudah memenuhi kaidah *bottom-up planning* dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan tingkat gampong, sehingga pemerintah kota dapat mengetahui secara persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) utama pembangunan.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rancangan Akhir Renstra Kuta Alam. Rancangan Akhir Renja juga merupakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada

hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang tidak melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kinerja Output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan dalam upaya melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan tersebut.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dari Total Belanja yang telah ditetapkan dalam perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pokok Tahun 2021 sebesar RP. 2.644.905.023,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.369.716.215,- (termasuk Gaji dan Tunjangan) dan Belanja Langsung sebesar 491.922.200,- dengan capaian realisasi pada Akhir Tahun 2020 sebesar 96,47%. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2021 yang tidak atau belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah sebagai berikutm:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Capaian Kinerja kegiatan ini hanya mencapai 31,56% hasil yang dicapai adalah persentase Perencanaan, dengan anggaran sebesar Rp. 5.442.700,- dan realisasi sebesar 1.717.700,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Capaian Kinerja kegiatan ini hanya mencapai 0%, hasil yang dicapai adalah persentase Penyelenggaraan Rapat koodinasi dan konsultasi SKPD, dikarenakan terkena refocusing akibat covid-19 dengan anggaran sebesar Rp. 42.000.000,-
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Capaian Kinerja kegiatan ini hanya mencapai 0%, hasil yang dicapai adalah persentase tersedianya peralatan dan mesin lainnya, dikarenakan terkena refocusing akibat covid-19 dengan anggaran sebesar RP. 9.914.000,-
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Capaian Kinerja kegiatan ini hanya mencapai 56,30%, hasil yang dicapai adalah persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran sebesar RP. 84.480.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.563.069,-
- Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
Capaian Kinerja kegiatan ini hanya mencapai 83,43%, hasil yang dicapai adalah persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor, dengan anggaran sebesar RP. 34.469.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.757.656,-

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Oprasional Atau Lapangan
Capaian Kinerja kegiatan ini hanya mencapai 82,21%, hasil yang dicapai adalah persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Oprasional Atau Lapangan, dengan anggaran sebesar RP. 24.932.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.496.400,-
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Capaian Kinerja kegiatan ini hanya mencapai 50,00%, hasil yang dicapai adalah persentase Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia, dengan anggaran sebesar RP. 4.618.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.309.000,-

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Capaian Kinerja kegiatan ini hanya mencapai 75,72%, hasil yang dicapai adalah persentase Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dengan anggaran sebesar RP. 52.512.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.761.000,-

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan**
Capaian Kinerja kegiatan ini hanya mencapai 28,35%, hasil yang dicapai adalah persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa, dengan anggaran sebesar RP. 5.774.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.637.000,-

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% hasil yang dicapai adalah jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan anggaran Rp 221.175.000

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 182,31% hasil yang dicapai adalah jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dengan anggaran Rp 2.278.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.153.000,-

b. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 104,98% hasil yang dicapai adalah jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa dengan anggaran Rp 4.259.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.471.250,-

- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 113,31% hasil yang dicapai adalah jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

dengan anggaran Rp 4.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.702.558,-

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/kegiatan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dilingkungan Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh belum semua memenuhi target kinerja program/kegiatan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang antara lain :

- a. Faktor-faktor penyebab/belum tercapainya target kinerja program/kegiatan karena program/kegiatan tersebut pelaksanaannya belum/tidak sesuai perencanaan yang telah ditentukan. Untuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan akhir periode Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun factor penghambat pencapaian target adalah :
 - Pada tahun 2020 adanya pandemic covid-19 dan sampai sekarang dimana adanya refocusing anggaran dan pembatasan kegiatan
 - Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi)
 - Masih terbatasnya jumlah kualitas sumber daya manusia (sdm) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pelaksanaan program dan kegiatan
 - Belum optimalnya penyebarluasan data dan informasi pembangunan daerah ke masyarakat.
 - Lemahnya ketersediaan data guna menunjang pembangunan masing-masing perangkat daerah
- b. Faktor penyebab terpenuhinya program dan kegiatan yang mencapai target karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisiki

maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang bersifat rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

- c. Faktor-faktor penyebab program dan kegiatan yang pencapaiannya melebihi target adalah karena adanya tuntutan, kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi real di lapangan.

2.1.5 Implimentasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.

Dikarenakan terdapat beberapa program kegiatan yang hingga awal tahun 2022 tidak didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai dan terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang kemudian sesuaikan kembali program kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan. Maka terjadi perubahan Indikator kinerja dan target capaian program kegiatan Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Berdasarkan pemaparan factor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

- Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2022
- Perubahan parameter penilaian prioritas kegiatan
- Efisiensi alokasi belanja
- Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target



- Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022 (tahun berjalan) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dapat dilihat pada table 2.1 (Terlampir).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuta Alam

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, maka kinerja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dapat dilihat dari indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2027 yaitu: **“Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Umum di Kecamatan”**

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kuta Alam dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

- Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor
- Meningkatnya disiplin aparatur
- Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat yaitu :

1. Bidang Penertiban

2. Bidang Pemeritahan Mukim dan Gampong
3. Bidang Pendidikan Dasar
4. Bidang Kesehatan
5. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
6. Bidang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kuta Alam pada tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- 1) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- 2) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong/kelurahan
- 3) Lomba Desa dan Lomba Kecamatan
- 4) Peningkatan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan
- 5) Pemberdayaan generasi muda
- 6) Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
- 7) Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan
- 8) Peningkatan pelayanan kesehatan di kecamatan
- 9) Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
- 10) Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong
- 11) Pengawasan, Pendataan, Monitoring, dan Evaluasi Objek Pajak dan Retribusi Daerah di Kecamatan
- 12) Pengawasan, Pendataan, Monitoring, dan Evaluasi Perizinan di Kecamatan

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan

Kuta Alam maka kedelapan hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Kuta Alam berdasarkan RKPD Kota Banda Aceh sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Rancangan awal Renja SKPD se-Kota Banda Aceh yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kuta Alam.

- Capaian Kinerja Tahun 2020

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan, dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya

pencapaian sasaran organisasi pada akhir priode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelaksanaan kinerja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tahun 2023 berdasarkan Rancangan Akhir RENJA 2023 yang sudah disusun menetapkan dua sasaran strategis, empat indikator kinerja, Tujuh program, dan tiga puluh lima kegiatan adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis 1: Persentase Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik

Indikator Kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut:

1. Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target 12 bulan.
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor dengan target 12 bulan.
3. Tersedianya baju pegawai Kecamatan Kuta Alam dengan target 36 orang.

Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis 1 tersebut adalah sbb:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu Rp. 297.995.280,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu Rp 306.769.223
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu Rp 24.345.360

Sasaran strategis 2: Kinerja Pemerintahan Gampong dan Kecamatan, administrasi pelayanan pemerintahan semakin baik

Indikator Kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan.

Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis 2 tersebut adalah sbb:

- Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 556.033.145,-

- Perkiraan Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun Pertama periode RPJMD 2023 – 2026 dan merupakan periode menilai awal pencapaian kinerja SKPD dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dan

stakeholders lainnya. Dikarenakan belum adanya Qanun RPJMD 2023 – 2026, maka program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rancangan Akhir Renja 2023 didasarkan pada kebutuhan masing-masing Rencana Kerja SKPD Tahun 2023.

Perkiraan pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kemampuan keuangan, SDM dan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kinerja SKPD. Melalui proses perencanaan yang matang, program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat direncanakan progress pelaksanaan sampai berakhirnya tahun anggaran.

Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada tahun 2023 menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, 4 (empat) indikator kinerja, 4 (empat) program, dan 22 (dua puluh dua) kegiatan.

Perkiraan Pencapaian kinerja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh 2023 secara lebih lengkap sesuai dengan penetapan kinerja 2023 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan uraian indikator kinerja beserta target pencapaian yang ditetapkan, diharapkan sampai akhir pelaksanaan tahun 2023 Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dapat mencapai target kinerja sebesar seratus persen atau minimal sama dengan pencapaian tahun 2022.

Selengkapnya mengenai kondisi kinerja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dapat dilihat pada table 2.2 (Terlampir):

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, maka pemerintah daerah memerlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dalam merumuskan, mendesain dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam pola organisasi pemerintah daerah dengan organisasi pemerintah kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan

fungsi pemerintah dan sebagai proses interaksi sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuta Alam dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah

Dalam rangka pelayanan kinerja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada rencana kinerja (Renja) Tahun 2023 Aparatur Kecamatan Kuta Alam Kabupaten Kota Banda Aceh meliputi :

1. Camat 1 orang
2. Sekcam 1 orang
3. Kasi Pemerintahan Mukim dan Gampong 1 orang
4. Kasi Keistimewaan Aceh dan Kesos
5. Kasi Trantib
6. Kasi Pelayanan Umum, Kerjasama dan Informasi
7. Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan
8. Kasubag Umum, Kepegawaian dan Aset
9. Fungsional umum 18 Orang

Tugas dan fungsi Kecamatan adalah :

1. Membantu Kepala Daerah (Walikota Banda Aceh) dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan; dan
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan landasan di atas, Susunan Organisasi Kecamatan Kuta Alam terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, Yang membawahi 2 (dua) Subbagian :
 - Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
 - Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

3. Seksi Pemerintahan Mukim dan Gampong
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
5. Seksi Pelayanan Umum, Kerjasama dan Informasi
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial.

Rincian Tugas dan fungsi struktur Kecamatan Kuta Alam dijabarkan sebagai berikut:

CAMAT

Uraian Tugas:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah/Qanun/Peraturan Walikota.
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
4. Penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
5. Membina dan mengawasi kegiatan gampong.
6. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja dan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
7. Melaksanakan urusan penatatausahaan kecamatan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

SEKRETARIS CAMAT

Uraian Tugas:

1. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.
2. Mempersiapkan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kecamatan.
3. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Kecamatan.
4. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

SUBBAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ASET

Uraian Tugas:

1. Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
4. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN

Uraian Tugas:

1. Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan penatausahaan keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Kecamatan;
1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Kecamatan;
2. Melaksanakan penatausahaan keuangan, penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Menyusun laporan keuangan di lingkungan Kecamatan;
5. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI PEMERINTAHAN MUKIM DAN GAMPONG

Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi pemilihan imum mukim dan keuchik, perangkat lembaga mukim dan gampong, tata kelola pemerintahan mukim dan gampong, kerjasama antar gampong, perselisihan antar gampong/sengketa gampong, penguatan tuha peut gampong, administarsi kependudukan dan pencatatan sipil, pemungutan PBB, bidang pertanahan, data dan informasi Pemerintahan;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi pemilihan imum mukim dan keuchik, perangkat lembaga mukim dan gampong, tata kelola pemerintahan mukim dan gampong, kerjasama antar gampong, perselisihan antar gampong/sengketa gampong, penguatan tuha peut gampong, administarsi kependudukan dan pencatatan sipil, pemungutan PBB, bidang pertanahan, data dan informasi Pemerintahan;

3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi pemilihan imum mukim dan keuchik, perangkat lembaga mukim dan gampong, tata kelola pemerintahan mukim dan gampong, kerjasama antar gampong, perselisihan antar gampong/sengketa gampong, penguatan tuha peut gampong, administarsi kependudukan dan pencatatan sipil, pemungutan PBB, bidang pertanahan, data dan informasi Pemerintahan;
4. Melaksanakan tugas dibidang fasilitasi pemilihan imum mukim dan keuchik, perangkat lembaga mukim dan gampong, tata kelola pemerintahan mukim dan gampong, kerjasama antar gampong, perselisihan antar gampong/sengketa gampong, penguatan tuha peut gampong, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemungutan PBB, bidang pertanahan, data dan informasi Pemerintahan sesuai rencana kerja;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi pemilihan imum mukim dan keuchik, perangkat lembaga mukim dan gampong, tata kelola pemerintahan mukim dan gampong, kerjasama antar gampong, perselisihan antar gampong/sengketa gampong, penguatan tuha peut gampong, administarsi kependudukan dan pencatatan sipil, pemungutan PBB, bidang pertanahan, data dan informasi Pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi pemilihan imum mukim dan keuchik, perangkat lembaga mukim dan gampong, tata kelola pemerintahan mukim dan gampong, kerjasama antar gampong, perselisihan antar gampong/sengketa gampong, penguatan tuha peut gampong, administarsi kependudukan dan pencatatan sipil, pemungutan PBB, bidang pertanahan, data dan informasi pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI PELAYANAN UMUM, KERJASAMA DAN INFORMASI

Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pelayanan umum, perizinan dan non perizinan, administratif, informasi dan kerjasama;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelayanan umum, perizinan dan non perizinan, administratif, informasi dan kerjasama;
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pelayanan umum, perizinan dan non perizinan, administratif, informasi dan kerjasama;
4. Melaksanakan tugas dibidang pelayanan umum, perizinan dan non perizinan, administratif, informasi dan kerjasama sesuai rencana kerja;
5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan umum, perizinan dan non perizinan, administratif, informasi dan kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan;
6. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan umum, perizinan dan non perizinan, administratif, informasi dan kerjasama sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan syariat islam, peraturan daerah, perizinan dan retribusi daerah, mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum, penanggulangan bencana alam dan kebakaran;

- b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan syariat islam, peraturan daerah, perizinan dan retribusi daerah, mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum, penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan syariat islam, peraturan daerah, perizinan dan retribusi daerah, mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum, penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- d. melaksanakan tugas dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan syariat islam, peraturan daerah, perizinan dan retribusi daerah, mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum, penanggulangan bencana alam dan kebakaran sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan syariat islam, peraturan daerah, perizinan dan retribusi daerah, mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum, penanggulangan bencana alam dan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan syariat islam, peraturan daerah, perizinan dan retribusi daerah, mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum, penanggulangan bencana alam dan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

Uraian Tugas:

- 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pemetaan potensi gampong, musrenbang gampong dan kecamatan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan usaha, potensi pendapatan

- perekonomian masyarakat, pembangunan di wilayah gampong, pembinaan dan pengembangan BUMG;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemetaan potensi gampong, musrenbang gampong dan kecamatan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan usaha, potensi pendapatan perekonomian masyarakat, pembangunan di wilayah gampong, pembinaan dan pengembangan BUMG;
 3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pemetaan potensi gampong, musrenbang gampong dan kecamatan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan usaha, potensi pendapatan perekonomian masyarakat, pembangunan di wilayah gampong, pembinaan dan pengembangan BUMG;
 4. Melaksanakan tugas pemetaan potensi gampong, musrenbang gampong dan kecamatan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan usaha, potensi pendapatan perekonomian masyarakat, pembangunan di wilayah gampong, pembinaan dan pengembangan BUMG sesuai rencana kerja;
 5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pemetaan potensi gampong, musrenbang gampong dan kecamatan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan usaha, potensi pendapatan perekonomian masyarakat, pembangunan di wilayah gampong, pembinaan dan pengembangan BUMG sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pemetaan potensi gampong, musrenbang gampong dan kecamatan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan usaha, potensi pendapatan perekonomian masyarakat, pembangunan di wilayah gampong, pembinaan dan pengembangan BUMG sesuai dengan lingkup tugasnya;
 7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, bimbingan dan penyuluhan sosial, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana, pendidikan umum dan agama, kemakmuran mesjid, meunasah dan mushalla, remaja mesjid di gampong, lembaga pendidikan al-qur'an di gampong, tilawatil quran, zakat, infak dan sedekah, toleransi umat beragama, kerukunan umat antar agama, adat istiadat, olahraga dan kesenian, kepemudaan, pramuka dan pemberdayaan perempuan, lembaga keagamaan dan sosial, ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, bimbingan dan penyuluhan sosial, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana, pendidikan umum dan agama, kemakmuran mesjid, meunasah dan mushalla, remaja mesjid di gampong, lembaga pendidikan al-qur'an di gampong, tilawatil quran, zakat, infak dan sedekah, toleransi umat beragama, kerukunan umat antar agama, adat istiadat, olahraga dan kesenian, kepemudaan, pramuka dan pemberdayaan perempuan, lembaga keagamaan dan sosial, ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan;
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, bimbingan dan penyuluhan sosial, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana, pendidikan umum dan agama, kemakmuran mesjid, meunasah dan mushalla, remaja mesjid di gampong, lembaga pendidikan al-qur'an di gampong, tilawatil quran, zakat, infak dan sedekah, toleransi umat beragama, kerukunan umat antar agama, adat istiadat, olahraga dan kesenian, kepemudaan, pramuka dan pemberdayaan perempuan, lembaga keagamaan dan sosial, ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan;
4. Melaksanakan tugas pembinaan, bimbingan dan penyuluhan sosial, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana, pendidikan umum dan agama, kemakmuran mesjid, meunasah dan mushalla, remaja mesjid di gampong, lembaga pendidikan al-qur'an di gampong,



- tilawatil quran, zakat, infak dan sedekah, toleransi umat beragama, kerukunan umat antar agama, adat istiadat, olahraga dan kesenian, kepemudaan, pramuka dan pemberdayaan perempuan, lembaga keagamaan dan sosial, ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan sesuai rencana kerja;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, bimbingan dan penyuluhan sosial, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana, pendidikan umum dan agama, kemakmuran mesjid, meunasah dan mushalla, remaja mesjid di gampong, lembaga pendidikan al-qur'an di gampong, tilawatil quran, zakat, infak dan sedekah, toleransi umat beragama, kerukunan umat antar agama, adat istiadat, olahraga dan kesenian, kepemudaan, pramuka dan pemberdayaan perempuan, lembaga keagamaan dan sosial, ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, bimbingan dan penyuluhan sosial, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana, pendidikan umum dan agama, kemakmuran mesjid, meunasah dan mushalla, remaja mesjid di gampong, lembaga pendidikan al-qur'an di gampong, tilawatil quran, zakat, infak dan sedekah, toleransi umat beragama, kerukunan umat antar agama, adat istiadat, olahraga dan kesenian, kepemudaan, pramuka dan pemberdayaan perempuan, lembaga keagamaan dan sosial, ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3.2 Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Kuta Alam.

Adapun permasalahan dalam pelayanan perangkat daerah diantaranya :

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang handal

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai
3. Masih rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya Tata Pengelolaan pemerintahan yang baik dimulai dari gampong s/d kecamatan
4. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam mendukung Proses Penyelenggaran Kemajuan Pemerintahan
5. Masih minimnya pengetahuan ASN terhadap Proses Pelayanan Prima.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah

Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kuta Alam diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kota Banda Aceh. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kuta Alam merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kota Banda Aceh.

Faktor faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Banda Aceh sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut ;

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang handal
2. Masih rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya Tata Pengelolaan pemerintahan yang baik dimulai dari gampong s/d kecamatan
3. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam mendukung Proses Penyelenggaran Kemajuan Pemerintahan
4. Masih minimnya pengetahuan ASN terhadap Proses Pelayanan Prima.

2.3.4 Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Kuta Alam meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa

daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Tantangan

Belum sepenuhnya terciptanya citra positif terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Kota Banda Aceh Khususnya dalam bidang

- a. akuntabilitas dan integritas aparatur serta bidang pelayanan Publik;
- b. Belum kuatnya jejaring informasi antar OPD Kota Banda Aceh khususnya dalam memberi counter terhadap pemberitahuan negative;
- c. Pesatnya Perkembangan TIK;
- d. Peningkatan Kapasitas SDM.

2. Peluang

- a. Peningkatan Kebutuhan Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;
- b. Kebutuhan Pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Kota Banda Aceh;
- c. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan public Kota Banda Aceh.

Bersdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun Eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisi. Dalam analisi Swot Lingkungan internal meliputi Strength (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity Peluang dan Ancaman Threats (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN:

- Visi dan misi organisasi yang jelas

- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Kewenangan koordinasi di tingkat

KELEMAHAN:

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kecamatan Kuta Alam
- Alokasi anggaran yang belum memadai
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG:

- Qanun RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022
- Agenda pembangunan tahunan Kota Banda Aceh
- tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan public dan akuntabilitas pemerintahan
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan

ANCAMAN :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya

- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat

2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting

Isu-Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan kuta alam adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya sangat signifikan dalam masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa akan datang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang factor pendorong dan penghambat dalam meningkatkan pelayanan OPD, maka dapat ditetapkan isu startegis Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

1. Integrasi aplikasi layanan public, taat kelola ekosistem e-Government belum optimal
2. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata kelola serta infrastruktur terkait ketersediaan dan keamanan

Permasalahan actual pada Tahun 2021 yang berkembang di masyarakat mengenai pandemic covid-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia perlu penanganan dan upaya penyelesaian yang diselaraskan denan visi dan misi kepala Daerah yang kemudian direalisasikan dalam bentuk usulan Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 pada masing-masing OPD di Kota Banda Aceh.

Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 memberikan dampak yang tidak hanya pada bidang kesehatan tetapi juga dengan bidang-bidang lain termasuk ekonomi dan social budaya masyarakat. Wabah Covid yang belum diketahui kapan akan berakhirnya menyebabkan ketidakpastian dan perlu antisipasi baik dari sisi pencegahan maupun penanganan dampak pandemic Covid-19 ini.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Kecamatan Kuta Alam berpedoman sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja kecamatan Dilingkungan pemerintahkota Banda Aceh. Adapun Tugas Pokok Camat yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 berbunyi :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan Mukim dan Gampong;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Walikota;
- f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat kotadi Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Mukim dan Gampong;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kota yang ada di Kecamatan;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Fungsi Camat yang diatur dalam pasal 8 berbunyi :

- a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Pemerintah Kota;
- b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- c. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain daripada tugas dan fungsi di atas Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan;
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kuta Alam bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Banda Aceh kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah,

potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Banda Aceh;

- 2) Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta dalam pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat;

Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Akhir Renja 2023 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Akhir Renja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.

Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Disamping itu juga, dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen Rancangan Akhir Renja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 yang telah diusulkan oleh Kecamatan Kuta Alam merupakan Rancangan Akhir Renja yang akan dilaksanakan Tahun 2023 dan telah dimuat dalam RKPD Tahun 2023.

Pada Bab ini memuat tentang Proses yang dilakukan dalam membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2023. Dimana Pada Tahun 2023 sesuai dengan Permendagri 050-5889 tahun 2021 telah dilakukan Pemetaan terhadap program dan Kegiatan yang ada di Tahun sebelumnya. Berikut akan dilampirkan Tabel 2.3 mengenai Reniew terhadap Rancanga Akhir RKPD Tahun 2023 dan juga Hasil Input pada Aplikasi SIPD Kemendagri yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 050-5889 tahun 2021

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Kecamatan Kuta Alam sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu dibidang Pelayan publik dan berkewajiban juga menyusun Rencana Akhir Renja Tahun 2023 yang mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari tingkat Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari peneliti lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten.

Usulan program/kegiatan dan pemangku kepentingan diperoleh dari hasil musrembang Kecamatan, Musrembang kota dan data internal Kecamatan Kuta Alam Usulan program/kegiatan yang sesuai dengan prioritas dapat direncanakan pada tahun berikutnya.

Berikut Tabel Tabel 2.4

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kuta Alam dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat;
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang terpadu dan aspiratif;
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
4. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang mandiri dan dinamis; dan
5. Melaksanakan peningkatan pelayanan pemerintahan kecamatan;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan awal Renja SKPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan”***

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 4 (empat) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai kecamatan Kuta Alam adalah ***“Terwujudnya Kecamatan yang ramah birokrasi”***

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka yang menjadi tujuan dan sasaran Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah :

1. Tujuan

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran melalui pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal sesuai dengan standar efisiensi kerja yang prima dan profesional kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, pembenahan, pembinaan, serta Pembinaan dan sosialisasi yang cepat dan tepat kepada masyarakat melalui aparatur yang profesional dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan potensi kecamatan di segala bidang

2. Sasaran

- a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima dan optimal kepada masyarakat
- b. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan potensi di segala bidang

3.3. ***Program dan Kegiatan***

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya

dilaksanakan OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari satu program.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan. Terdapat penyesuaian dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 050-3889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun Program-program Kecamatan Kuta Alam yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan pemetaan dan penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Program Syariat Islam Aceh

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Berpedoman pada tahun sebelumnya

maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu:
 - a). Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b). Pencapaian SDGs,
 - c). Pengentasan Kemiskinan,
 - d). Pencapaian NSPK dan SPM
 - e). Pendayagunaan Potensi ekinomi daerah,
 - f). Pengembangan daerah terisolir.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tahun 2023 merencanakan 7 program, 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Program yang dilaksanakan terdiri dari 1 pogram yang bersifat rutin dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD dan 6 program bersifat teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, dengan kegiatannya :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat kecamatan.
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat

kecamatan

- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
 - Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan pada Camat.
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Dengan kegiatannya :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
 - Gammawar
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
 - Penanganan Covid-19 ditingkat desa dan kelurahan
- c. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ditingkat kecamatan dan kelurahan
 - Peningkatan ketahanan pangan keluarga

4. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum

- a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatannya :

- a. Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
 - Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
 - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemberdayagunaan aset desa
 - Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
 - Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa
 - Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum

7. Program Syariat Islam

- a. Peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan Al-quran
 - Pelaksanaan MTQ

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber dananya. Pada tahun 2023 Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dari hasil penetapan RKPD tahun 2023 merencanakan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp3.662.587.205 (Tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah).

Perubahan pada pagu indikatif hampir terjadi pada setiap sub kegiatan sebagai akibat dari adanya prioritas penganggaran disesuaikan dengan



kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah. Untuk mengetahui rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 pada Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dapat dilihat pada table 3.1 (Terlampir)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN KUTA ALAM

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Kuta Alam tahun 2023 berpedoman pada Program dan Kegiatan Renstra 2023-2026, setiap rencana kerja dan pendanaan pada tahun 2023 harus memiliki tolak ukur yang jelas berupa indikator kinerja, target kegiatannya, pagu anggaran setiap kegiatan serta kelompok sasaran dari program dan kegiatan tersebut sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan.

Pencapaian Indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data informasi dasar untuk melakukan indentifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberiperingatan dini terhadap masalah yang berkembang memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan penegendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah di buat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Indikator Kinerja Kecamatan Kuta Alam mengacu pada tujuan dasasaran Renstra adalah insikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kuta alam dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran Kecamatan Kuta Alam Tahun 2023 sebagaimana terdapat pada tabel 4.1 (lihat lampiran).

BAB V

PENUTUP


Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2023 yang berdasarkan pada penetapan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 merupakan acuan dasar atau pedoman dalam penyusunan anggaran untuk program dan kegiatan yang nantinya disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023. Rancangan Awal Renja ini bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kuta Alam. Rancangan Akhir Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kuta Alam. Rancangan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana kerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan Rancangan Akhir Renja yang telah dibuat.

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rancangan Akhir rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rancangan awal rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Demikian Renjana Akhir Kerja (RENJA) Kecamatan Kuta alam Tahun 2023 disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi dan misi Kecamatan Kuta Alam Tahun 2023-2026

Banda Aceh, Juli 2023
CAMAT KUTA ALAM

Arie Jandjar, S.STP, M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 198101272000121003



LAMPIRAN

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Banda Aceh

SKPD : Kecamatan Kuta Alam

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Kuta Alam Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Kuta Alam s/d Tahun 2022	
								Target Renja Kecamatan Kuta Alam Tahun 2021	Realisasi Renja Kecamatan Kuta Alam Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				URUSAN KEWILAYAHAN									
01				Kecamatan									
01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
01	01	2.01		Perencanaan dan Program Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja	10 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	0%	4 Kegiatan	8 Kegiatan	80%
01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
01	01	2.03		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
01	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
01	01	2.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	36 Bulan	300%	12 Bulan	60 Bulan	100%
01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	230 Jenis	46 Jenis	46 Jenis	46 Jenis	100%	46 Jenis	138 Jenis	60%
01	01	2.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang disediakan	25 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	15 Jenis	60%



01	01	2,03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	30 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	5 Jenis	83%	6 Jenis	17 Jenis	57%
01	01	2,03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	25.190 Porsi	5.038 Porsi	5.038 Porsi	5.038 Porsi	100%	5.038 Porsi	15.114 Porsi	60%
01	01	2,03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan	300%	2 Laporan	10 Laporan	100%
01	01	2,03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas / Oprasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang di sediakan	4 Unit	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Unit	0%
01	01	2,03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	25 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	15 Jenis	60%
01	01	2,03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	4 Kali	1 Kali	1 Kali	2 Kali	200%	1 Kali	4 Kali	100%
01	01	2,03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dinas/operasional yang dilaksanakan	180 Kali	36 Kali	36 Kali	108 Kali	300%	36 Kali	180 Kali	100%
01	01	2,03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	85 Kali	160 Kali	17 Kali	51 Kali	300%	17 Kali	51 Kali	60%
01	01	2,04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparaturnya perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
01	01	2,04	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan	150 Stel	36 Stel	36 Stel	90 Stel	250%	36 Stel	90 Stel	60%
01	01	2,04	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	150 Stel	36 Stel	36 Stel	90 Stel	250%	36 Stel	90 Stel	60%
01	02			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
01	03	2,01		Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%



01	03	2,01	02	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Jumlah peserta Musyawarah Pembangunan Desa	10 Kegiatan	80 Orang	2 Kegiatan	6 kegiatan	300%	2 Kegiatan	6 Kegiatan	60%
01	02	2.04		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase koodinasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
01	03	2,01	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pendapatan, monitoring dan evaluasi perizinan	15 Orang	200 Orang	3 Kegiatan	9 Orang	300%	3 Kegiatan	9 Orang	60%
01	03			Program pemberdayaan Masyarakat dan kelurahan	Persentase Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
01	06	2,01		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
01	03	2,01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Jumlah peserta Musyawarah Pembangunan Desa	400 Kali	80 Kali	80 orang	80 Kali	100%	80 orang	240 Kali	60%
01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah pemuda yang di berdayakan	15 Kegiatan	0 Kali	3 kegiatan	3 Kali	100%	3 Kegiatan	9 Kegiatan	60%
01	06			Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
01	06	2.01		Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ADG	400 Kali	0 Kali	80 Kali	80 Kali	100%	80 Kali	240 Kali	60%
01	06	2,01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pendapatan, monitoring dan evaluasi perizinan	120 Kali	80 Kali	24 Kali	24 Kali	100%	24 Kali	72 Kali	60%

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 (2.1 b)																		
Kota Banda Aceh																		
Nama SKPD : Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh																		
U r u s a n	B i d a n	K o d e	K e g i a t	u b k e g i a t	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Program	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Aderah)Tahun 2021-2022 (akhir periode renstra SKPD)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021				Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Belanja (2022) Renja SKPD Tahun Berjalan (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerahs/d Tahun 2022		Ket		
									Target Renja Perangkat DaerahTahun 2021	RealisasiRenja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4		5		6	7=(6/5)	8	9=8+6	10=(9/4)x100	11		
7					Kewilayahan													
7	01				Urusan Kewilayahan Kecamatan													
7	01				Kecamatan		100,00%		100%		100%		100%	100,00%	200%	200		
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%										
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kecamatan yang tersusun	100	%										
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Rentra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	8	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100	4	8	dokumen	100	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100	%										
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	24	bulan	100	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	24	bln	12	bulan	12	bulan	100	12	24	bulan	100	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%										
7	01	01	2.05	01	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan-nya yang disediakan	60	stell	30	bulan	30	stell	100	30	60	stel	100	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari tertentu Beserta Perlengkapan-nya yang disediakan	60	stell	30	stell	30	stell	100	30	60	stel	100	

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100	%									
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8	jenis	4	Jenis	4	Jenis	100	4	8	Jenis	100
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10	jenis	5	jenis	5	jenis	100	5	10	Jenis	100
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	2	laporan	5	laporan	5	laporan	100	5	10	Laporan	500
7	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%									
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Mesin Yang disediakan	12	jenis	6	bulan	6	jenis	100	6	12	Jenis	100
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang disediakan	14	unit	7	unit	7	unit	100	7	14	unit	100
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%									
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	24	bln	12	bualn	12	bulan	100	12	24	bulan	100
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24	bln	12	bulan	12	bulan	100	12	24	bulan	100
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%									
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	unit	3	unit	3	unit	100	3	6	unit	100
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10	jenis	5	jenis	5	jenis	100	5	10	jenis	100
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2	unit	1	unit	1	unit	100	1	2	unit	100



7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	100	%									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100	%									
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan kecamatan dan gampong/kelurahan	10	kegiatan	5	kegiatan	5	kegiatan	100	5	10	kegiatan	100
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan pada camat	Persentase pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	%					103	%	106	%	107
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	8	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	100	4	8	kegiatan	100
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100	%									
7	01	03	2.01		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100	%									
7	01	03	2.01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Jumlah peserta musyawarah pembangunan desa	160	orang	80	orang	80	orang	100	80	160	orang	100
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Pemuda dan jumlah kegiatan PKK	6	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan	100	3	6	kegiatan	100
7	01	06			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pelaksanaan dan pengawasan pemerintah gampong dikecamatan	100	%									
7	1	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	%									
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi desa dan perlombaan desa	10	kegiatan	5	kegiatan	5	kegiatan	100	5	10	0	100
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemberdayagunaan aset desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan ADG	4	kegiatan	2	kegiatan	2	kegiatan	100	2	4	0	100
7	01	06	2.01	11	sub kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Penyelenggaraan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100	1	2	0	100

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020 (2.1 a)
Kota Banda Aceh

Nama SKPD : Kecamatan Kuta Alam

U r u s a n	B i d · U r u s a n	P r o g r a m	K e g i a t a n	S u b k e g i a t a n	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Darah) Tahun 2017-2020 (akhir periode renstra SKPD)	Ralisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2020	Ket
1					2	3	4	5	6=(5/4)x100	8
7					Kewilayahan					
7	01				Urusan Kewilyahan Kecamatan					
7	01				Kecamatan		100%	100%	100	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	100	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kecamatan yang tersusun	100 %	100 %	100	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Rentra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	16 dokumen	4 dokumen	6,25	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	100	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	48 bln	12 bln	25,00	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	48 bln	12 bln	25,00	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	
7	01	01	2.05	01	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan-nya yang disediakan	120 stell	30 stell	25,00	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari tertentu Beserta Perlengkapan- nya yang disediakan	120 stell	30 stell	25,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %	100 %	100	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	16 jenis	4 jenis	25,00	

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20	jenis	5	jenis	25,00	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	6	laporan	2	laporan	33,33	
7	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Mesin Yang disediakan	24	jenis	6	jenis	25,00	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang disediakan	28	unit	7	unit	25,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbe r Daya Air & Listrik	48	bln	12	bln	25,00	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	bln	12	bln	25,00	
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	unit	3	unit	25,00	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20	jenis	5	jenis	25,00	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	4	unit	1	unit	25,00	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelyanan Publik Kecamatan	100	%	100	%	100	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100	%	100	%	100	

7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan kecamatan dan gampong/kelurahan	20 kegiatan	5 kegiatan	25,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan pada camat	Persentase pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %	100 %	100	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	16 kegiatan	4 kegiatan	25,00	
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100	
7	01	03	2.01		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Jumlah peserta musyawarah pembangunan desa	320 orang	80 orang	25,00	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Pemuda dan jumlah kegiatan PKK	12 kegiatan	3 kegiatan	25,00	
7	01	06			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pelaksanaan dan pengawasan pemerintah gampong dikecamatan	100 %	100 %	100	
7	1	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	100	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi desa dan perlombaan desa	20 kegiatan	5 kegiatan	25,00	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemberdayagunan aset desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan ADG	8 kegiatan	2 kegiatan	25,00	
7	01	06	2.01	11	sub kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Penyelenggaraan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 kegiatan	1 kegiatan	25,00	



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Banda Aceh

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penungkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) d KecamatanKuta Alam			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan Peningkatan Nilai AKIP			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Peningkatan Indeks Ketentraman umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Peningkatan indekas Kota Syariah (IKS) di Kecamatan Kuta Alam			78,27%	79,77%	81,27 %	82,77%	78,77%	79,77 %	81,27%	82,77%	



Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Aceh / Kota Banda Aceh

Nama Perangkat Daerah :Kecamata Kuta alam

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan				2.923.144.472	Kecamatan				3.186.587.205	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				2.821.740.772	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				3.099.589.073	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.423.689	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.323.160	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	7.423.689	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4.323.160	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.619.466.357	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.882.909.090	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ Bulan	2.400.166.357	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ Bulan	2.663.609.090	
3	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	219.300.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	219.300.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.700.000	
4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	-	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	17.700.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				22.343.083	Administrasi Umum Perangkat Daerah				23.397.245	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.009.095	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	886.179	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.647.097	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.410.798	
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	18.686.891	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	20.100.268	



8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.170.899	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				26.217.000	
9	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	7.170.899	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	26.217.000	
11	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118.921.773	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.646.578	
14	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	84.480.000	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	74.880.000	
15	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	34.441.773	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	25.766.578	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.414.971	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				44.396.000	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	24.932.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	20.936.000	
17	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.544.971	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.758.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.938.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.702.000	
18	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				78.800.504	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				39.397.582	
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				48.604.164	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				24.358.232	



	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	48.604.164	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	24.358.232	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				3.000.000	
21	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	-	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	3.000.000	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				30.196.340	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				12.039.350	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah laporan pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah laporan pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	2.000.000	
22	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	30.196.340	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	10.039.350	
	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				6.623.557	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				25.229.613	
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa				6.623.557	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa				17.561.057	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyar akatan	2.141.500	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyar akatan	2.141.500	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	4.482.057	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	5.419.557	
	Lomba Gammawar	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Lomba PKK yang di Laksanakan		-	Lomba Gammawar	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Lomba PKK yang di Laksanakan		10.000.000	
	Pemberdayaan Mukim				-	Pemberdayaan Mukim				4.740.356	
	Penyelenggaraan Mukim	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	1 dokumen	-	Penyelenggaraan Mukim	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	1 dokumen	1.586.276	
	Pelantikan Imeum Mukim	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim	1 laporan	-	Pelantikan Imeum Mukim	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim	1 laporan	3.154.080	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				1.928.200	



	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 dokumen	-	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 dokumen	1.928.200	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				-	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				1.000.000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	1.000.000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				-	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				1.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				1.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	1.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				1.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				15.979.639	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				17.370.937	
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				15.979.639	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				17.370.937	
	Fasilitasi adminstrasi tata pemerintahan desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 dokumen	6.023.582	Fasilitasi adminstrasi tata pemerintahan desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 dokumen	5.775.000	
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 dokumen	4.256.057	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 dokumen	4.076.857	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	3.019.080	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0 dokumen	-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0 dokumen	1.000.000	



	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 dokumen	5.700.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 dokumen	500.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	3.000.000	
	Program Syariat Islam Aceh				-	Program Syariat Islam Aceh				3.000.000	
	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran				-	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran				3.000.000	
	Pelaksana MTQ	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	0 orang		- Pelaksana MTQ	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	0 orang	3.000.000	



Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

No	Rancangan Awal RKPD				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikator (Rp)	
1	2	3	4	6	12
	Kecamatan			2.923.144.472	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2.821.740.772	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.423.689	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.423.689	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.619.466.357	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.400.166.357	
3	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	219.300.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	
4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			22.343.083	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.009.095	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.647.097	
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.686.891	
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.170.899	
9	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.170.899	
11	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			118.921.773	
14	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84.480.000	
15	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34.441.773	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.414.971	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24.932.000	
17	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.544.971	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16.938.000	
18	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			78.800.504	
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			48.604.164	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48.604.164	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			-	
21	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	-	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			30.196.340	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah laporan pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	-	
22	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30.196.340	
	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			6.623.557	
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			6.623.557	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.141.500	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.482.057	
	Lomba Gammawar	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Lomba PKK yang di Laksanakan	-	
	Pemberdayaan Mukim			-	
	Penyelenggaraan Mukim	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	-	
	Pelantikan Imeum Mukim	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			-	
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			-	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			-	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			-	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	



	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			15.979.639	
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			15.979.639	
	Fasilitasi adminsitrasi tata pemerintahan desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.023.582	
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.256.057	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.700.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	Program Syariat Islam Aceh			-	
	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran			-	
	Pelaksana MTQ	Kantor Camat Kuta Alam	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	-	



Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Banda Aceh

SKPD : Kecamatan Kuta Alam

					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					Kewilayahan		Kota Banda Aceh	100 %	Rp 3.662.587.205	APBK		100 %	4.028.845.926
7	01				Urusan Kewilayahan Kecamatan		Kota Banda Aceh	100 %	3.662.587.205	APBK		100 %	4.028.845.926
7	01				Kecamatan		Kota Banda Aceh	100 %	3.662.587.205	APBK		100 %	4.028.845.926
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Kota Banda Aceh	100 %	3.450.589.073	APBK		100 %	3.795.647.980
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kecamatan yang tersusun	Kota Banda Aceh	100 %	4.323.160	APBK		100 %	#REF!
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Rentra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh	4 dokumen	4.323.160	APBK		4 dokumen	4.755.476
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	Kota Banda Aceh	100 %	3.233.909.090	APBK		100 %	3.557.299.999
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Kota Banda Aceh	12 bulan	3.014.609.090	APBK		12 Bulan	3.316.069.999
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang	Kota Banda Aceh	12 bulan	219.300.000	APBK		12 Bulan	241.230.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh	100 %	17.700.000	APBK		100 %	19.470.000
7	01	01	2.05	01	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan-nya yang disediakan	Kota Banda Aceh	33 stel/org	17.700.000	APBK		33 stel/org	19.470.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	Kota Banda Aceh	100 Laporan	23.397.245	APBK		3 laporan	25.736.970
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh	5 paket	886.179	APBK		5 paket	974.797
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Banda Aceh	4 paket	2.410.798	APBK		4 Paket Jenis	2.651.878

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh	2	Laporan	20.100.268	APBK	2	Laporan	22.110.295
7	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh	100	%	26.217.000	APBK	100	%	28.838.700
7	01	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas/oprasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Disediakan	Kota Banda Aceh			-	APBK			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Mesin Yang disediakan	Kota Banda Aceh	12	unit	26.217.000	APBK	12	unit	28.838.700
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Banda Aceh			-	APBK			
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saranana dan Prasarana Gedung Kantor ataun Bangunan Lainnya Yang disediakan	Kota Banda Aceh	0	unit	Rp -	APBK	0	unit	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh	100	%	100.646.578	APBK	100	%	110.711.236
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Kota Banda Aceh	12	bulan	74.880.000	APBK	12	bulan	82.368.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh	12	bulan	25.766.578	APBK	12	bulan	28.343.236
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Banda Aceh	100	%	44.396.000	APBK	100	%	48.835.600
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banda Aceh	2	unit	20.936.000	APBK	2	unit	23.029.600
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Banda Aceh	5	unit	2.758.000	APBK	5	unit	3.033.800
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	Kota Banda Aceh	1	unit	20.702.000	APBK	1	unit	22.772.200
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelyanan Publik Kecamatan	Kota Banda Aceh	100	%	71.397.582	APBK	100	%	78.537.340
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Kota Banda Aceh	100	%	33.358.232	APBK	100	%	36.694.055
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan kecamatan dan gampong/kelurahan	Kota Banda Aceh	2	kegiatan	33.358.232	APBK	2	kegiatan	36.694.055

7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat kecamatan	Kota Banda Aceh	100 %	16.000.000	APBK		100 %	17.600.000
7	01	02	2.01	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Banda Aceh	1 dokumen	16.000.000	APBK		1 dokumen	17.600.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan pada camat	Persentase pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan yang diimpahkan kepada camat	Kota Banda Aceh	100 %	22.039.350	APBK		100 %	24.243.285
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Banda Aceh	1 Dokumen	10.000.000	APBK		1 dokumen	11.000.000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kota Banda Aceh	3 laporan	12.039.350	APBK		3 laporan	13.243.285
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Kota Banda Aceh	100 %	40.729.613	APBK		100 %	44.802.574
7	01	03	2.01		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Kota Banda Aceh	100 %	24.761.057	APBK		100 %	27.237.163
7	01	03	2.01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Jumlah peserta musyawarah pembangunan desa	Kota Banda Aceh	2 Lembaga Kemasyar akatan	2.141.500	APBK		2 Lembaga Kemasyar akatan	2.355.650
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Pemuda dan jumlah kegiatan PKK	Kota Banda Aceh	1 laporan	7.619.557	APBK		1 laporan	8.381.513
7	01	03	2.01	03	GAMMAWAR	Jumlah kegiatan Lomba PKK	Kota Banda Aceh	1 kegiatan	15.000.000	APBK		1 kegiatan	16.500.000
7	01	03	7.04		Pemberdayaan Mukim	Persentase pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Mukim	Kota Banda Aceh		4.740.356	APBK			5.214.392
7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	Kota Banda Aceh	1 dokumen	1.586.276	APBK		1 dokumen	1.744.904
					Pelantikan Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imuem Mukim	Kota Banda Aceh	1 dokumen	3.154.080	APBK		1 dokumen	3.469.488
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Singkronisasi Pemberlakuan Pemberantasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase dan Singkronisasi Pemberlakuan Pemberantasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kota Banda Aceh		8.428.200	APBK			9.271.020
7	01	03	2.05	01	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan kelurahan	Kota Banda Aceh	1 laporan	8.428.200	APBK		1 laporan	9.271.020
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Banda Aceh		2.800.000	APBK			3.080.000
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Banda Aceh	keluarga	2.800.000	APBK		keluaraga	3.080.000

7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Banda Aceh		2.000.000				2.200.000
7	1	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Banda Aceh		2.000.000	APBK			2.200.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lapangan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Banda Aceh	laporan	2.000.000	APBK		laporan	2.200.000
7	01	03			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Banda Aceh		2.000.000				2.200.000
7	1	04	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Banda Aceh		2.000.000	APBK			2.200.000
7	01	04	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Banda Aceh	dokumen	2.000.000	APBK		dokumen	2.200.000
7	01	06			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pelaksanaan dan pengawasan pemerintah gampong dikecamatan	Kota Banda Aceh	100 %	90.870.937	APBK		100 %	99.958.031
7	1	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kota Banda Aceh	100 %	90.870.937	APBK		100 %	99.958.031
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi desa dan perlombaan desa	Kota Banda Aceh	2 kegiatan	11.325.220	APBK		2 kegiatan	12.457.742
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemberdayagunaan aset desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan ADG	Kota Banda Aceh	3 kegiatan	25.697.254	APBK		2 kegiatan	28.266.979
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	Kota Banda Aceh	1 dokumen	19.239.284	APBK		1 dokumen	21.163.212
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kota Banda Aceh	1 dokumen	5.221.150	APBK		1 dokumen	5.743.265



7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengakatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Banda Aceh	1 dokumen	2.883.042	APBK		1 dokumen	3.171.346
7	01	06	2.01	11	sub kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Penyelenggaraan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Banda Aceh	1 kegiatan	26.504.987	APBK		1 kegiatan	29.155.486
7	01	02			Program Syariat Islam Aceh	Persentase Terlaksananya Program Syariat Islam Aceh	Kota Banda Aceh	100 %	5.000.000	APBK		100 %	5.500.000
7	1	02	7.02	04	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran	Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran	Kota Banda Aceh	100 %	5.000.000	APBK		100 %	5.500.000
7	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	Kota Banda Aceh	orang	5.000.000	APBK		orang	5.500.000

Banda Aceh, Juni 2022
CAMAT KUTA ALAM

Arie Januar, S.STP, M.Si
Pembina TK-I
Nip. 198101272000121003



Tabel 4.1
Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran
Kecamatan Kuta Alam Tahun 2023
Kota Banda Aceh

					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target		Pagu Anggaran	Kelompok Sasaran
								Volume	Satuan		
					2	3	4	5	6	7	8
7					Kewilayahan			100	%	Rp 3.662.587.205	
7	01				Urusan Kewilyahan Kecamatan		Kota Banda Aceh	100	%	3.662.587.205	
7	01				Kecamatan		Kota Banda Aceh	100	%	3.662.587.205	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Kota Banda Aceh	100	%	3.450.589.073	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kecamatan yang tersusun	Kota Banda Aceh	100	%	4.323.160	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Rentra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh	4	dokumen	4.323.160	Dokumen Evaluasi kinerja
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	Kota Banda Aceh	100	%	3.233.909.090	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Kota Banda Aceh	12	bulan	3.014.609.090	PNS Kantor Camat Kuta Alam
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	Kota Banda Aceh	12	bulan	219.300.000	PNS dan Tenaga Kontrak Kantor Camat Kuta Alam
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh	100	%	17.700.000	
7	01	01	2.05	01	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan-nya yang disediakan	Kota Banda Aceh	33	stel/org	17.700.000	Kantor Camat Kuta Alam
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	Kota Banda Aceh	100	Laporan	23.397.245	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh	5	paket	886.179	Kantor Camat Kuta Alam
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Banda Aceh	4	paket	2.410.798	Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Camat Kuta Alam
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh	2	Laporan	20.100.268	Kendaraan Dinas Kantor Camat Kuta Alam

7	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh	100	%	26.217.000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas/oprasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Disediakan	Kota Banda Aceh			-	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Mesin Yang disediakan	Kota Banda Aceh	12	unit	26.217.000	Peralatan dan Mesin Kantor Camat Kuta Alam
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Banda Aceh			-	Gedung Kantor Camat Kuta Alam
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saranana dan Prasarana Gedung Kantor ataun Bangunan Lainnya Yang disediakan	Kota Banda Aceh	0	unit	Rp -	Prasarana Gedung Kantor Camat Kuta Alam
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh	100	%	100.646.578	Kantor Camat Kuta Alam
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Kota Banda Aceh	12	bulan	74.880.000	Kantor Camat Kuta Alam
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh	12	bulan	25.766.578	Kantor Camat Kuta Alam
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh	100	%	44.396.000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banda Aceh	2	unit	20.936.000	Kendaraan Dinas Kantor Camat Kuta alam
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Banda Aceh	5	unit	2.758.000	Pemeliharaan Peralatan Mesin Kantor Camat Kuta Alam
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	Kota Banda Aceh	1	unit	20.702.000	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Camat Kuta Alam
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelyanan Publik	Kota Banda Aceh	100	%	71.397.582	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Kota Banda Aceh	100	%	33.358.232	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan kecamatan dan gampong/ke lurahan	Kota Banda Aceh	2	kegiatan	33.358.232	Masyarakat di Kecamatan
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat kecamatan	Kota Banda Aceh	100	%	16.000.000	
7	01	02	2.01	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Banda Aceh	1	dokumen	16.000.000	

7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase pelaksanaan koordinasi urusan	Kota Banda Aceh	100	%	22.039.350	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	10.000.000	Perizinan di wilayah Kecamatan Kuta Alam
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kota Banda Aceh	3	laporan	12.039.350	Masyarakat di Kecamatan
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Kota Banda Aceh	100	%	40.729.613	
7	01	03	2,01		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Kota Banda Aceh	100	%	24.761.057	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan	Jumlah peserta musyawarah pembangunan desa	Kota Banda Aceh	2	Lembaga Kemasyarakatan	2.141.500	Masyarakat di Kecamatan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Pemuda dan jumlah kegiatan PKK	Kota Banda Aceh	1	laporan	7.619.557	Masyarakat di Kecamatan
7	01	03	2.01	03	GAMMAWAR	Jumlah kegiatan Lomba PKK	Kota Banda Aceh	1	kegiatan	15.000.000	Masyarakat di Kecamatan
7	01	03	7.04		Pemberdayaan Mukim	Persentase pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Mukim	Kota Banda Aceh			4.740.356	
7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	Kota Banda Aceh	1	dokumen	1.586.276	Masyarakat di Kecamatan
					Pelantikan Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imuem Mukim	Kota Banda Aceh	1	dokumen	3.154.080	Masyarakat di Kecamatan
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Singkronisasi Pemberlakuan Pemberantasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase dan Singkronisasi Pemberlakuan Pemberantasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kota Banda Aceh			8.428.200	
7	01	03	2.05	01	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan kelurahan	Kota Banda Aceh	1	laporan	8.428.200	Masyarakat di Kecamatan
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Banda Aceh			2.800.000	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Banda Aceh		keluarga	2.800.000	Masyarakat di Kecamatan
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Banda Aceh			2.000.000	Masyarakat di Kecamatan
7	1	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Banda Aceh			2.000.000	Masyarakat di Kecamatan
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lapangan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Banda Aceh		laporan	2.000.000	Masyarakat di Kecamatan

7	01	03			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Banda Aceh			2.000.000	
7	1	04	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Banda Aceh			2.000.000	
7	01	04	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Banda Aceh		dokumen	2.000.000	Masyarakat di Kecamatan
7	01	06			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pelaksanaan dan pengawasan pemerintah gampong dikecamatan	Kota Banda Aceh	100	%	90.870.937	
7	1	06	2,01		Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kota Banda Aceh	100	%	90.870.937	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi desa dan perlombaan desa	Kota Banda Aceh	2	kegiatan	11.325.220	Masyarakat di Kecamatan
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemberdayagunaan aset desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan ADG	Kota Banda Aceh	3	kegiatan	25.697.254	Masyarakat di Kecamatan
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	Kota Banda Aceh	1	dokumen	19.239.284	Masyarakat di Kecamatan
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kota Banda Aceh	1	dokumen	5.221.150	Masyarakat di Kecamatan
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengakatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Banda Aceh	1	dokumen	2.883.042	Masyarakat di Kecamatan
7	01	06	2.01	11	sub kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Penyelenggaraan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Banda Aceh	1	kegiatan	26.504.987	Masyarakat di Kecamatan
7	01	02			Program Syariat Islam Aceh	Persentase Terlaksananya Program Syariat Islam Aceh	Kota Banda Aceh	100	%	5.000.000	
7	1	02	7,02	04	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran	Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran	Kota Banda Aceh	100	%	5.000.000	
7	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	Kota Banda Aceh		orang	5.000.000	Masyarakat di Kecamatan

Banda Aceh, Juni 2022
CAMAT KUTA ALAM

Arie Januar, S.STP, M.Si
Pembina TK-I
Nip. 198101272000121003